KEBIJAKAN PEMIDANAAN DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Ani Triwati, Universitas Semarang, anitriwati@gmail.com
Subaidah Ratna Juita, Universitas Semarang, ratna.shmh@yahoo.co.id
M. Iftar Aryaputra, Universitas Semarang, iftar_aryaputra@ymail.com

Abstract

The impence of imprisonment for abusers in the Narcotics Law indicates that narcotics abusers as perpetrator of criminal act. Judges in examining and deciding narcotics abuse cases, especially in imposing conviction and / or rehabilitation decisions, have an important role in the prevention and eradication of narcotics crime. Judges were variant in making decisions for narcotics abusers, this is also related to the arraignment of the public prosecutor. The problem in this study is focused on whether punishment is necessary for narcotics abusers. The approach method used is the normative juridical method and the research specification was carried out with analytically descriptive. The main data source used was secondary data, using data collection techniques through literature study. Data analysis was carried out prescriptively with the statutory approach. Convictions for narcotics abusers potentially become repetition of the criminal act in terms the abusers could become an addict or even as drug dealer. Narcotics abusers are people in sickness which need recovery through medical and social rehabilitation, not imprisonment or deprivation of liberty which could contribute to the narcotics crime improvement and overcapacity of jails or prisons. Abusers obtain the value of justice through medical and social rehabilitation, so that the rights guaranteed in the constitution are fulfilled.

Keywords: *policy; conviction; abuser; narcotics.*

Intisari

Ancaman pidana penjara bagi penyalah guna dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan penyalah guna narkotika sebagai pelaku tindak pidana. Hakim dalam memeriksa dan memutus kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan/ atau rehabilitasi memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hakim bervariasi dalam menjatuhkan putusan bagi penyalah guna narkotika, hal ini berkaitan pula dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada apakah diperlukan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Pemidanaan bagi penyalah guna narkotika berpotensi pada pengulangan tindak pidana dimana penyalah guna dapat menjadi pecandu atau bahkan pengedar. Penyalah guna narkotika merupakan orang yang sakit, sehingga membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan

yang dapat memberi andil pada meningkatnya tindak pidana narkotika dan *over capacity* dalam Rutan atau Lapas. Penyalah guna memperoleh nilai keadilan melalui rehabilitasi medis dan sosial, sehingga hak yang dijamin dalam konstitusi terpenuhi.

Kata Kunci: kebijakan; pemidanaan; penyalah guna; narkotika.

A. Pendahuluan

Jumlah narapidana yang terjerat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika mencapai angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kasus lain seperti korupsi, terorisme atau tindak pidana umum. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami menyebut jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) dan Rutan di Indonesia mencapai 255.000. Jumlah itu didominasi napi kasus narkotika yakni sebanyak 115.000 orang.¹ Tingginya kasus narkotika tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), peraturan pelaksana terkait dan aparat penegak hukum. Meningkatnya jumlah pengonsumsi narkoba dan telah menjadi persoalan nasional, salah satunya ditengarai oleh penegakan undang-undang atau menegakan hukum atau kebijakan kriminal yang inkonsistensi, jika tidak disebut lemah.²

Penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam hal pelaku sebagai pengedar atau penyalah guna atau korban penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan dan penerapan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pemahaman aparat penegak hukum sangat penting, khususnya bagi hakim yang memeriksa dan menjatuhkan putusan. Hakim dapat memberikan putusan untuk memerintahkan penyalah guna atau pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah, atau menetapkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, hal ini sesuai Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang

¹Taufik Budi, Jumlah Napi Narkoba Rajai Lapas di Indonesia, <https://jateng.sindonews.com/read/1266/1/jumlah-napi-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia-1548954178>, diakses 14 Februari 2020.

² Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN "SMH" Serang, Banten, hlm 34.

Narkotika menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian penyalah guna yang diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara, wajib direhabilitasi dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut dihitung termasuk dalam masa menjalani pidana atau hukuman. Pelaku penyalah guna memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi baik medis maupun sosial, Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menentukan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Berdasarkan ketentuan Pasal 54 tersebut, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pemahaman dan keberanian hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam menjatuhkan putusan memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Putusan yang diberikan di antaranya didasarkan pada alat bukti dalam persidangan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan, ada yang menyimpang atau keluar dari dakwaan jaksa, sebagai contoh dalam Putusan Nomor 592 /Pid.Sus /2016/PN.Smg. Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa sebagai pengedar, tetapi hakim memutuskan bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna bukan sebagai pengedar. Putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan pemahaman hakim dalam melihat fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat memberikan putusan yang tepat dan adil bagi terdakwa.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkum HAM Jhoni Ginting menyatakan bahwa over kapasitas lapas dan rutan tak bisa dipungkiri didominasi warga binaan kasus narkoba. Kasus narkoba jumlahnya besar dibanding yang lain, 60 persennya (warga binaan) itu narkoba.³ Direktur Program *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Erasmus Napitupulu menyatakan bahwa jaminan adanya rehabilitasi yang diatur dalam UU Narkotika tidak membuat pengguna narkotika bebas dari ancaman pidana penjara. Ironisnya, lapas dan rutan di Indonesia justru kerap mengalami kondisi

³Mukhlis Dinillah, Napi Narkoba Dominasi Penjara, Kemenkumham Dorong Revisi PP 99, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4615415/napi-narkoba-dominasi-penjara-kemenkum-ham-dorong-revisi-pp-99>, diakses 14 Februari 2020.

keadaan over kapasitas yang kebanyakan diisi oleh pengguna narkoba.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa putusan pidana atau pidana perampasan kemerdekaan terhadap pelaku penyalah guna narkoba memberikan andil tersendiri sebagai faktor penyebab *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim setelah proses pemeriksaan di pengadilan. Sudarto menyatakan bahwa penghukuman dapat disempitkan artinya yaitu dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim.⁵ Pemidanaan dan/atau rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan bagian dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Institusi terkait perlu memahami, khususnya bagi aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Tujuan pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan tapi lebih berfokus pada perbaikan atau pemulihan pelaku dalam hal ini penyalah guna, meskipun pidana tetap dijatuhkan dengan tujuan untuk penjeraan. Pidana penjara terhadap penyalah guna selain berhubungan langsung dengan keadaan pelaku yang membutuhkan rehabilitasi, juga berakibat kelebihan kapasitas di Lapas sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan bagi penyalah guna narkoba.

Kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶ Kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan dibuat sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana dibuat dalam upaya pembaharuan

⁴Rofiq Hidayat, *Pentingnya Dekriminalisasi terhadap Pengguna Narkoba*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7faa428034f/pentingnya-dekriminalisasi-terhadap-pengguna-narkoba/>, diakses 14 Februari 2020.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Pidana dan Pemidanaan”, (Semarang : Fakultas Hukum Unisula, 1982), hlm 1.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 23.

hukum pidana, untuk membuat peraturan menjadi lebih baik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk kebijakan dalam Undang-Undang Narkotika berkaitan dengan pemidanaan dan rehabilitasi penyalah guna narkotika.

Penyalah guna dalam Undang-Undang Narkotika adalah sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan nilai keadilan bagi penyalah guna narkotika, yang pada dasarnya membutuhkan pemulihan kesehatan dan berintegrasi kembali dengan masyarakat. Kebijakan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika perlu dicermati berkaitan dengan pemahaman hakim dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada apakah diperlukan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat analisis data dilakukan secara preskriptif.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

Pemidanaan khususnya pidana perampasan kemerdekaan atau penjara bagi penyalah guna narkotika masih dijatuhkan oleh sebagian hakim meskipun diikuti dengan kewajiban rehabilitasi. Hal ini tidak terlepas dari undang-undang yang mengkriminalisasikan penyalah guna narkotika sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkotika) menentukan :

- (1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 184.

Pasal 127 ayat (1) secara eksplisit menentukan pidana penjara bagi penyalah guna narkotika meskipun dalam memutus perkara penyalah guna narkotika, hakim juga wajib memperhatikan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pidana penjara bagi penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan adanya kriminalisasi bagi penyalah guna narkotika atau pemakai narkotika tanpa hak, sehingga tidak berbeda dengan pengedar narkotika yang sudah seharusnya dijatuhi pidana. Perkembangan yang diakibatkan tidak adanya pembedaan antara pemakai, penyalah guna, pecandu dan pelaku peredaran narkotika serta kesemuanya diancam dengan pidana penjara, telah menjadikan Indonesia yang semula menjadi negara transit mengalami pergeseran sebagai negara produsen dan konsumen narkotika, dikarenakan korban penyalah guna narkotika atau pecandu narkotika yang seharusnya dipulihkan namun kenyataannya tidak.⁸ Penilaian salah-tidaknya apa yang dilakukan oleh pecandu, tidaklah kemudian menghilangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi guna pemulihan. Sebagai manusia, mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perlu ditolong agar mereka dapat kembali hidup secara wajar menjadi manusia yang produktif.⁹

Pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika juga memberikan andil tersendiri terjadinya kelebihan kapasitas dalam Rutan dan Lapas. Menurut Sri Puguh Budi Utami Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), para napi dan tahanan ditempatkan dalam 522 Lapas maupun Rutan. Tren jumlah napi terus meningkat, seiring banyaknya orang yang terjerat kasus narkoba. Mereka tak sepenuhnya menjalani rehabilitasi tetapi dijebloskan ke penjara¹⁰. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap penyalah guna, berkaitan pula dengan pemahaman atau penafsiran hakim dalam memaknai Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang menentukan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

⁸Anang Iskandar, *Re-Orientasi Penanganan Permasalahan Narkoba di Indonesia*, Seminar Nasional “Dekriminalisasi dan Depenalisasi Bagi Pengguna Narkoba”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014, FH Undip, Semarang 19 Agustus 2014, hlm. 6.

⁹Akmal Hawi, *REMAJA PECANDU NARKOBA: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, Tadrib, Vol. IV, No.1, Juni 2018, hlm 100.

¹⁰Taufik Budi, *loc. cit.*

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Kata “dapat” dalam Pasal 103 ayat (1) menimbulkan perbedaan penafsiran bagi hakim. Menurut penafsiran hakim, kata dapat dalam Pasal 103 ayat (1) berarti fakultatif maknanya bisa ya bisa tidak digunakan tergantung pada keyakinan hakim, sedangkan kata “dapat” dalam Pasal 103 ayat (1) tersebut merupakan kewenangan ekstra atau kewenangan tambahan untuk menghukum rehabilitasi, selain menyatakan bersalah kemudian menjatuhkan hukuman dan menyatakan tidak bersalah diikuti dengan membebaskan dari hukuman¹¹. Tidak adanya perintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu, dapat berakibat penyalah guna menjadi pecandu dan terjadinya pengurangan tindak pidana, serta kelebihan kapasitas di Rutan maupun Lapas. Perbedaan penafsiran kata “dapat” menyebabkan lebih dari 62 ribu penyalah guna mendekam di penjara.¹²

Berkaitan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA tersebut ditentukan bahwa penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 huruf a dan b hanya dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana dalam hal tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (dengan rincian dalam SEMA No. 4 Tahun 2010), surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika. Selanjutnya diatur

¹¹ Iskandar, Anang, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 15.

¹² *Ibid.*

bahwa hakim yang menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi. Dalam SEMA tersebut ditentukan lamanya proses rehabilitasi dan wajib diperlukan keterangan ahli. Standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut bahwa untuk Program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1(1) bulan, Program Primer lamanya 6 (enam) bulan, Program Re-Entry lamanya 6 (enam) bulan. Berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut, hakim dalam memerintahkan rehabilitasi sudah ada pedoman klasifikasi tindak pidana bagi penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Demikian pula dengan lamanya proses rehabilitasi, yang telah ditentukan dengan proses paling lama 6 (enam) bulan. Waktu lamanya proses rehabilitasi semestinya tetap didasarkan pada pertimbangan medis dengan melihat hasil perkembangan setelah dilakukan rehabilitasi, apakah dapat diperpanjang karena masih perlu dilakukan rehabilitasi lagi dalam upaya pemulihan kesehatan pecandu atau penyalah guna.

Berkaitan dengan rehabilitasi, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, di antaranya menentukan bahwa bagi pecandu narkoba yang masih dalam proses peradilan baik di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai tingkat pemeriksaan dengan rekomendasi dari tim dokter. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi tersebut termasuk bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2011, kewenangan penyidik dan penuntut umum (untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial) dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk penetapan hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara. Dengan demikian diperlukan penetapan hakim yang didasarkan pada rekomendasi penyidik dan penuntut umum yang memperkuat rekomendasi tim dokter dalam rangka

penempatan tersangka dan terdakwa di lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya SEMA No. 3 Tahun 2011 menentukan bahwa lama yang bersangkutan (tersangka atau terdakwa) di lembaga rehabilitasi ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Penempatan tersangka atau terdakwa di lembaga rehabilitasi sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP menentukan “Tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”, sehingga penempatan penyalah guna atau pecandu dalam lembaga rehabilitasi sudah seharusnya dilakukan untuk memperoleh perawatan.

Negara memberikan perhatian khusus terhadap penyalah guna narkotika dengan mengeluarkan berbagai instrumen hukum berkaitan dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkotika khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Negara menyadari bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menderita sakit dan orang yang menjadi korban, sehingga wajib disembuhkan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan hukum pidana yang telah dilakukan khususnya mengenai penyalah guna narkotika. Dalam rangka penanganan penyalahgunaan narkotika, dibuat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan bersama tersebut pada intinya bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi, terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Dalam Peraturan Bersama tersebut di antaranya menentukan penempatan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu dan korban

penyalahgunaan narkoba pada saat proses peradilan (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan), pada saat ditangkap tidak ada barang bukti narkoba dan positif berdasarkan hasil tes (urine, darah atau rambut), ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkoba sesuai hasil tes (urine, darah, rambut atau DNA), pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang merangkap sebagai pengedar. Selain itu diatur juga terdakwa atau terpidana pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu narkoba yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.

Penyalah guna narkoba pada dasarnya lebih memerlukan rehabilitasi medis dan sosial untuk menyembuhkan sakitnya agar nantinya tidak menjadi pecandu, sehingga yang dibutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi bukan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana perampasan kemerdekaan atau penjara adalah sebagai konsekuensi bahwa penyalah guna merupakan pelaku tindak pidana dan dalam upaya memberikan efek jera. Meskipun demikian rehabilitasi merupakan sarana yang tepat bagi penyalah guna untuk memulihkan kesehatan.

Pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba, memberikan peluang bertemunya penyalah guna dan pengedar dalam Lapas, sehingga interaksi yang terjadi dapat membawa akibat terjadinya pengulangan tindak pidana. Penyalah guna dapat menjadi pecandu dan pengedar narkoba, akibat tidak dilakukan rehabilitasi atau waktu rehabilitasi yang kurang dan karena interaksi yang terjadi antar pelaku tindak pidana narkoba atau pelaku tindak pidana yang lain. Teori Asosiasi Diferensial mengkaji mengenai penyebaran tingkah laku kriminal yang diperoleh melalui proses interaksi. Lingkungan pelaku (di Rutan atau Lapas) merupakan bagian dalam proses belajar, dimana interaksi yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pun dapat menjadi sarana penyebaran tingkah laku kriminal. Teori Asosiasi Diferensial tidak ditujukan pada isu asal mula kejahatan dalam masyarakat, melainkan berfokus pada

penyebaran sikap dan perilaku kriminal¹³. Teori Asosiasi Diferensial mengkaji mengenai penyebaran tingkah laku kriminal, hal ini sebagai akibat putusan pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Interaksi antar pelaku tindak pidana narkoba, dapat mengakibatkan munculnya penyalah guna baru, pecandu atau pengedar narkoba yang baru, sehingga kasus tindak pidana narkoba cenderung meningkat. Proses interaksi dapat terus berlanjut sebagai akibat putusan pidana penjara yang dijatuhkan hakim pada penyalah guna. Pemidanaan belum tentu memberi efek jera bagi penyalah guna, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus tindak pidana narkoba dan pengulangan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kasus tindak pidana narkoba dan pengulangan tindak pidana juga menjadi faktor penyebab lebihnya kapasitas dalam Rutan atau Lapas, hal ini menimbulkan masalah baru bagi negara di antaranya sumber daya manusia yang kurang dan anggaran yang membengkak.

Instrumen internasional *United Nations Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*, G.A. res. 45/110, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 197, U.N. Doc. A/45/49 (1990), memberikan alternatif pidana perampasan kemerdekaan atau penjara sebagai salah satu upaya mengurangi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana, dalam hal ini termasuk bagi penyalah guna narkoba. Tujuan mendasar dari *Tokyo Rules* di antaranya memberikan seperangkat prinsip dasar untuk mempromosikan penggunaan tindakan non penahanan, serta perlindungan bagi orang-orang yang menerima alternatif hukuman penjara. Selain itu, juga ditentukan bahwa negara anggota harus mengembangkan tindakan nonpenahanan atau nonpenjara dengan mengingat penghormatan hak-hak asasi, keadilan sosial dan kebutuhan akan rehabilitasi pelaku kejahatan.¹⁴ Kebutuhan rehabilitasi khususnya bagi penyalah guna narkoba lebih diperlukan daripada pidana penjara. Penyalahgunaan NAPZA cenderung mengakibatkan ketergantungan/dependensi, atau kecanduan. Biasanya penyalahgunaan menghasilkan akibat yang serius dan dalam beberapa kasus bisa fatal

¹³Frank E. Hagan , 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, Diterjemahkan dari buku aslinya *Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behavior Edition 7*, sage Publication, Inc., Penerjemah Noor Cholis, hlm. 228.

¹⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penaggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 107.

dan mengakibatkan kematian serta kerugian sosial dan ekonomi.¹⁵ Penyalah guna memerlukan pemulihan kesehatan agar tidak menjadi pecandu, dengan tindakan represif terhadap pelaku dan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak muncul penyalah guna atau pecandu narkoba yang baru. Penggunaan narkoba baik dalam taraf coba-coba maupun sudah pada ketergantungan merupakan manifestasi gangguan jiwa dalam bentuk penyimpangan perilaku dari norma-norma umum yang berlaku.¹⁶

Pembaharuan Undang-Undang Narkotika khususnya berkaitan dengan kebijakan pemidanaan bagi penyalah guna narkoba perlu dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkotika merupakan bagian kebijakan hukum pidana, sebagai upaya negara membuat peraturan perundang-undangan menjadi lebih baik dengan memberikan penanganan khusus bagi penyalah guna narkoba untuk memperoleh pemulihan dengan menempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada Pancasila sebagai cita hukum. Pancasila sebagai cita hukum, mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif. Fungsi konstitutif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sedangkan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil.¹⁷ Pemulihan atau rehabilitasi medis merupakan hak bagi penyalah guna narkoba sebagai wujud dari nilai keadilan. Penyalah guna membutuhkan pemulihan yaitu kesehatan dan integrasi dengan masyarakat, bukan pidana penjara yang dapat memberikan akibat buruk bagi yang bersangkutan. Penyalah guna dapat memperoleh nilai keadilan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial terpenuhi. Adil bagi penyalah guna narkoba dalam arti bahwa dipenuhi haknya sebagai warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam upaya pemulihan agar tidak menjadi pecandu narkoba atau pengedar.

¹⁵ Dwitiyanti, Kriana Efendi, Supandi, Penyuluhan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif Bagi Siswa Siswi SMA dan SMK MUTIARA 17 AGUSTUS, Jurnal SEMAR Vol. 8 No. 1, 2019 hal. 40 – 43 ISSN: 2302-3937, hlm. 40.

¹⁶ Sri Yuni Murtiwidayanti, Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal PKS Vol 17 No 1 Maret 2018, hlm 49.

¹⁷ Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 36.

Hak warga negara termasuk hak penyalah guna narkotika untuk memperoleh lingkungan yang sehat baik dan sehat serta pelayanan kesehatan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Penjatuhan pidana penjara bagi penyalah guna, menempatkan pengguna pada lingkungan yang kurang tepat, meskipun dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika hakim dapat memberikan putusan untuk memerintahkan penyalah guna atau pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah atau menetapkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, hal ini juga tergantung pada penafsiran hakim. Pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dilakukan dalam waktu yang singkat, kurang menjamin pulihnya penyalah guna atau pecandu narkotika. Masa pemulihan melalui rehabilitasi bagi penyalah guna semestinya ditentukan secara kasuistis dan didasarkan pada hasil pemeriksaan medis, demikian pula dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Penjatuhan pidana bagi penyalah guna memberi potensi pengulangan tindak pidana dimana penyalah guna dapat menjadi pecandu atau bahkan pengedar. Penyalah guna narkotika merupakan orang yang sakit, yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan yang dapat memberi andil pada meningkatnya tindak pidana narkotika dan *over capacity* dalam Rutan atau Lapas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pemidanaan bagi penyalah guna memberi potensi pengulangan tindak pidana dimana penyalah guna dapat menjadi pecandu atau bahkan pengedar. Penyalah guna narkotika merupakan orang yang sakit, sehingga membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pidana penjara yang memberi andil meningkatnya tindak pidana narkotika dan *over capacity* dalam Rutan atau Lapas. Penyalah guna dapat memperoleh nilai keadilan melalui rehabilitasi medis dan sosial, sehingga hak yang dijamin dalam konstitusi terpenuhi. Undang-Undang

Narkotika sebagai bagian kebijakan hukum pidana, merupakan upaya negara membuat peraturan perundang-undangan menjadi lebih baik, sehingga bagi penyalah guna narkotika diperlukan penanganan khusus dengan menempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan revisi dalam Undang-Undang Narkotika di antaranya Ketentuan Pasal 103 berkaitan dengan kata “dapat” yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pembuat undang-undang dengan aparat penegak hukum khususnya hakim.
- b. Perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan pasal yang disangkakan atau didakwakan, dalam hal ini sering penyalah guna disangka atau didakwa dengan pasal sebagai pencedar.

E. Daftar Pustaka

- Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN “SMH” Serang, Banten.
- Akmal Hawi, *REMAJA PECANDU NARKOBA: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, Tadrib, Vol. IV, No.1, Juni 2018.
- Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- , Re-Orientasi Penanganan Permasalahan Narkoba di Indonesia, “Seminar Nasional Dekriminalisasi dan Depenalisasi Bagi Pengguna Narkoba” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014, FH Undip, Semarang 19 Agustus 2014.
- AR Sudjono, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Dwitiyanti, Kriana Efendi, Supandi, Penyuluhan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif Bagi Siswa Siswi SMA dan SMK *MUTIARA 17 AGUSTUS*, Jurnal SEMAR Vol. 8 No. 1, 2019 hal. 40 – 43 ISSN: 2302-3937.

- Eva Achjani Zulva, 2017, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat, Depok, Rajawali Pers.
- Frank E. Hagan , Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Diterjemahkan dari buku aslinya Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behavior Edition 7, sage Publication, Inc., Penerjemah Noor Choliz.
- Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Yogyakarta, Paradigma
- M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yasin, Pecandu Narkotika yang Tidak Dapat Dituntut, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt595f3a8c67506/pecandu-narkotika-yang-tidak-dapat-dituntut/>, diakses 14 februari 2020.
- Mukhlis Dinillah, Napi Narkoba Dominasi Penjara, Kemenkumham Dorong Revisi PP 99, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4615415/napi-narkoba-dominasi-penjara-kemenkum-ham-dorong-revisi-pp-99>, diakses 14 Februari 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, “Pidana dan Pemidanaan”, Semarang, Fakultas Hukum Unisula.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang, Selaras, 2010.
- Rofiq Hidayat, Pentingnya Dekriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7faa428034f/pentingnya-dekriminalisasi-terhadap-pengguna-narkotika/>, diakses 14 Februari 2020.
- Sri Yuni Murtiwidayanti, Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal PKS Vol 17 No 1 Maret 2018, 47 – 60.
- Taufik Budi, Jumlah Napi Narkoba Rajai Lapas di Indonesia, <https://jateng.sindonews.com/read/1266/1/jumlah-napi-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia-1548954178>, diakses 14 Februari 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.